

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tinjauan tentang Sejarah Nasionalisme

Nasionalisme mula-mula muncul dan menjadi kekuatan di negara Barat diawali setelah Kerajaan di Eropa Barat mengalami keruntuhan menumbuhkan kelompok persukuan yang dalam waktu berikutnya melakukan penaklukan sampai terbentuk negara feodal. Pada saat penaklukan secara feodal Perancis dalam perkembangannya menjadi sadar bahwa dirinya merupakan kelompok nasional yang besar karena masyarakat mulai menggunakan bahasa Perancis yang mempunyai bentuk sendiri dan daerah bahasa mempunyai batas-batasnya yang tegas secara geografis. Pemakaian bahasa menjadi bentuk sadar bahwa nasion mulai terbentuk.

Kemudian dalam tulisannya Dewi (2008: 4) menyebutkan bahwa di Inggris mengalami perkembangan yang hampir sama yaitu dilihat dari bahasa penakluk-penakluk Perancis yang disatukan dengan bahasa asli Anglo Saxon dan menjadi bahasa Inggris. Hal ini berarti kenyataan Inggris terdiri dari pulau sehingga segera membentuk kohesi dan terpisah dari negeri-negeri lain. Nasionalisme yang menyala ini dimasukkan oleh Shakespear dalam pengagungannya tentang perjuangan lama melawan Perancis dan Spanyol dalam sejarahnya.

Terdapat anggapan bahwa nasionalisme muncul pertama kali pada abad ke-17 sebagaimana terdapat dalam tulisan Yatim (1999: 64), “manifestasi nasionalisme muncul pertama kali di Inggris pada abad ke-17, ketika terjadi

Revolusi Puritan”. Berkembanglah pada abad ke-18, nasionalisme diidentifikasi sebagai gerakan politik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dan menjamin hak-hak warga negara. Terdapat berbagai asumsi menyatakan bahwa nasionalisme pada mulanya lahir dan berkembang dari Barat yang kemudian menyebar ke daerah-daerah jajahan sampai melahirkan nasionalisme dengan berbagai bentuk.

Perasaan mirip nasionalisme sudah banyak dimiliki rakyat waktu itu, meskipun hanya sebatas pada individu (fanatisme pribadi) yang muncul jika ada bahaya yang mengganggu atau membahayakan eksistensi mereka (masyarakat koloni) atau keluarga serta golongan mereka. Muncul perasaan tersebut dilakukan melalui distribusi buku-buku di Eropa pada saat terjadinya reformasi Luther pada abad pertengahan sebagai akibatnya gereja *novus populus* mengalami kemerosotan. Dalam hal ini, terdapat pengaruh kapitalisme dalam bentuk komunitas terbayang yang dengan kapitalisme, bahasa, dan kultur ikut bersekutu dalam membangun masyarakat kebangsaan.

Di Inggris bentuk nasionalisme lahir atas dasar penolakan sistem keabsolutan dan birokrasi yang berlebihan. Golongan menengah memegang peranan penting karena timbulnya perdagangan dan industri. Dapat dikatakan bahwa nasionalisme di Inggris terbentuk dan tumbuh sejajar dengan parlementarisme. Kemudian, melihat nasionalisme di benua Amerika tumbuh sejajar dengan pemikiran liberalisme, gerakan perlawanan terhadap sistem kekuasaan yang diskriminatif. Berbagai macam gejolak berdatangan di benua Amerika sampai pada masa John Locke mencetuskan prinsip kemerdekaan

yang menjunjung persamaan manusia sebagai tindak lanjutnya menjadi dasar bagi sistem demokrasi. Dari nasionalisme Amerika berdampak dengan munculnya Revolusi Perancis menandakan kesetiaan kepada bangsa dan tanah air menjadi landasan kesetiaan warga negara.

Permunculan nasionalisme Perancis melahirkan negara nasional baru sebagai bentuk tindakan diskriminasi yang dilakukan oleh kaum aritokrat sampai terjadilah Revolusi Perancis pada 1789. Berdasarkan pernyataan Yatim (1999: 173), dapat dijelaskan bahwa:

Sejak zaman nasionalisme inilah keberadaan dan sikap rakyat banyak memegang peranan penting yang akhirnya digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan negara serta mensahkan bentuk diktatorisme birokrat baik secara kenegaraan maupun kepentingan pribadi. Sifat dan warna nasionalisme Barat cenderung pada bentuk kapitalisme, menindas rakyat, imperialisme dan saling menyerang.

Berdasarkan hal tersebut, semangat nasionalisme di Perancis terbentuk atas perasaan sama akan kebebasan. Penghapusan segala bentuk diskriminasi menjadikan Perancis ingin merubah sistem menjadi demokrasi. Begitupula yang dialami oleh Jerman dengan yang mengedepankan nasionalisme ras. Tokoh Hitler sebagai kunci nasionalisme sempit dengan artian menjunjung kesombongan atas ras menjadikan benih perang dunia kedua bermunculan.

Kemajuan pesat dalam ilmu pengetahuan sejarah pada awal pertengahan abad ke-19 memengaruhi penyebaran paham nasionalisme di antara kaum terpelajar. Sebagai contoh adalah tokoh Mazzini yang menggambarkan nasionalisme pada masa tersebut dengan mendirikan suatu pergerakan organisasi rahasia revolusioner. Namun, perkembangan di Eropa Daratan sebagai benturan revolusi mengakibatkan nasionalisme yang semula bersifat

kemanusiaan dan liberal berubah menjadi bersifat memusuhi bangsa lain dan agresif (Kohn, 1984: 54).

Nasionalisme di abad ke-20 di beberapa negara bergerak ke arah nasionalisme totaliter, seperti yang dialami Jerman dan Italia. Di Italia terdapat paham fasisme yang menitikberatkan pada kedaulatan negara daripada kedaulatan rakyat. Menurut paham nasionalisme-fasisme, individu itu tercipta untuk kepentingan negara. Dalam paham nasionalisme-sosialis (NAZI) Jerman di bawah pimpinan Hitler terdapat pendapat yang menitikberatkan faktor ras, yaitu keturunan bangsa Arya yang diciptakan Tuhan sebagai pembawa dan penyebar peradaban ke seluruh dunia. Paham tersebut adalah lanjutan tradisi nasionalisme-romantisme Jerman pada abad ke-19, tetapi muncul di abad ke-20 dalam bentuk yang dianggap ekstrim (Dewi, 2008: 6).

Setelah dianggap kurang berkuasa di Barat, kehendak untuk memperluas paham nasionalisme di seluruh dunia terjadi pada abad ke-20. Nasionalisme, dalam perspektif sejarah menunjukkan perkembangannya sangat pesat. Jika abad sembilan belas sering disebut abad ‘Nasionalisme Eropa’, maka pada abad ke dua puluh nasionalisme telah menjadi *a universal idea-force* dalam kekuatan sejarah global kontemporer, bahkan sebagai abad *pan-nasionalisme*. Paham nasionalisme yang mulai meluas tersebut memunculkan negara-negara baru di seluruh dunia. Pada abad ini, masa pertama dalam sejarah dimana “seluruh umat manusia mempunyai sikap politik yang satu dan sama yakni nasionalisme” (Kohn, 1984: 115). Banyaknya gerakan kebangsaan di Eropa tersebut yang kemudian terpecah belah menjadi negara-negara baru merdeka yang lebih kecil,

maka timbul arti 'nasion' sebagai inti dari nasionalisme. Pada akhirnya, perkembangan nasionalisme menyebar ke berbagai benua termasuk benua Asia dan Afrika. Kendati demikian, nasionalisme tidaklah sama di setiap negara dan setiap zaman dikarenakan suatu peristiwa sejarah ditentukan oleh ide-ide politik dan susunan masyarakat dari berbagai negara dimana negara tersebut berakar. Tidak terkecuali di negara-negara Asia khususnya Indonesia.

Nasionalisme Indonesia jelas berbeda dengan nasionalisme Barat karena nasionalisme Indonesia bersenyawa dengan keadilan sosial, anti kolonialisme, yang menurut Soekarno disebut *socio-nasionalism*. Nasionalisme Indonesia lahir dipengaruhi penderitaan panjang di bidang ekonomi, sosial, pendidikan, hukum dan politik. Atas dasar itulah muncul sejarah pergerakan nasional sebagai fenomena historis dalam usaha memperbaiki perlakuan dan penderitaan yang dialami bangsa Indonesia. Melalui semangat kebangsaan dari bangsa yang terjajah mengakibatkan terjadinya faktor dalam mewujudkan kemerdekaan. Rachmat (Kusumawardani dan Faturochman, 2004: 65) menjelaskan sejarah terbentuknya nasionalisme di Indonesia disebabkan adanya 'perasaan senasib sepenanggungan yang merupakan suatu reaksi subyektif dan kemudian kondisi obyektif secara geografis menemukan koneksitasnya'.

Indonesia membuktikan puncak nasionalismenya setelah terjadi Perang Dunia II yang dibuktikan dengan membentuk konsensus tentang *nation* dalam memproklamasikan Indonesia sebagai negara merdeka. Indonesia melepaskan diri dari segala bentuk kolonialisme yang dilakukan secara terus-menerus dan melakukan penolakan terhadap berbagai ancaman kolonialisme merupakan

suatu manifestasi dari nasionalisme Indonesia. Dalam hal ini dapat dijelaskan bahwa Indonesia memiliki bentuk nasionalisme yang berbeda dengan nasionalisme di Eropa. Kenyataan sejarah membuktikan nasionalisme Indonesia lahir sebagai reaksi terhadap penjajahan kolonial sementara itu nasionalisme Eropa lahir sebagai akibat pergeseran masyarakat agraris menuju masyarakat industri yang merupakan dampak dari revolusi industri.

Nasionalisme Indonesia terlihat jelas menjadi suatu kekuatan besar sebagai proses yang dimotori oleh kemunculan kesadaran nasional yang dirumuskan oleh kaum inteligensia dan diperluas melalui partai politik pergerakan nasional hingga menjadi gerakan massa yang anti kolonial (Alfian, 1996: 34). Akan tetapi perjalanan nasionalisme itu tidak selalu mengembirakan dan belum berakhir. Terdapat kesan bahwa dalam perkembangan baru di berbagai bidang semakin gencar mendera nasionalisme.

B. Tinjauan tentang Nilai-nilai Nasionalisme

1. Pengertian Nilai

Nilai atau *value* termasuk bidang kajian filsafat. Persoalan-persoalan tentang nilai dibahas dan dipelajari dalam cabang filsafat yaitu filsafat nilai (*axiologi, theory of value*). Apabila ditinjau dalam kajian filsafat, nilai dipergunakan untuk menunjuk kata benda abstrak yang artinya keberhargaan atau kebaikan dan kata kerja yang artinya suatu tindakan kejiwaan tertentu dalam menilai atau melakukan penilaian. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai dianggap berharga, mempunyai kualitas dan berguna bagi manusia.

Merujuk pendapat Bertens (2007: 139), menyatakan bahwa “nilai merupakan sesuatu yang menarik, sesuatu yang menyenangkan, sesuatu yang disukai dan diinginkan dan sesuatu yang baik”. Sementara itu, Mulyana (2004: 24), mendefinisikan “nilai merupakan sesuatu yang diinginkan sehingga melahirkan tindakan pada diri seseorang. Dalam hal ini, mencakup nilai intelektual (benar-salah), nilai estetika (indah-tidak indah) dan nilai etika (baik-buruk)”.

Berkaitan dengan objektivitas nilai, menurut Kaelan (2002: 123), nilai pada hakikatnya adalah sifat atau kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Sesuatu itu mengandung nilai, artinya ada sifat atau kualitas yang melekat pada sesuatu itu. Lebih lanjut dijelaskan oleh Aryani (Zakiyah dan Rusdiana, 2014: 27), bahwa hakikat nilai adalah rujukan dan keyakinan dalam menentukan pilihan. Rujukan tersebut berupa norma, etika, peraturan perundang-undangan, adat kebiasaan, aturan agama, dan rujukan lainnya yang memiliki harga dan dirasakan berharga bagi seseorang, nilai bersifat abstrak, berada di belakang fakta, melahirkan tindakan, melekat dalam moral seseorang, muncul sebagai ujung proses psikologis, dan berkembang ke arah yang lebih kompleks.

Berdasarkan pernyataan di atas maka dapat dirangkum tentang pengertian bahwa nilai merupakan sesuatu yang berharga dan dapat dijadikan sebagai rujukan atau standar untuk mengukur segala sesuatu yang tercermin dalam tindakan dan tingkah laku yang berlaku.

2. Pengertian Nasionalisme

Secara bahasa, nasionalisme merupakan serapan kata *nation* yang berasal dari bahasa latin '*natio*' berarti 'saya lahir'. Apabila merujuk peradaban Romawi, kata *natio* dipakai untuk mengolok-olok orang asing. Hal ini memengaruhi pendefinisian nasionalisme sehingga diidentifikasi dalam makna negatif. Meskipun demikian, perkembangan zaman semakin kompleks membawa pengertian nasionalisme lebih beragam dan juga tidak melihat pada berbagai penampilannya karena pada dasarnya lahir sebagai respon terhadap kekuatan bersama. Terdapat pemaknaan lebih positif yang dipakai setelah abad ke-18 di Perancis.

Pada saat revolusi Perancis para parlemen menyebut diri mereka sebagai *assemblee nationale* yang menjadi pertanda transformasi institusi politik atas sifat eksklusif yang hanya berlaku bagi kaum bangsawan ke sifat egaliter di mana semua kelas meraih hak sama dalam berpolitik. Efeknya sampai sekarang membuat pemaknaan *nation* menunjuk kepada bangsa atau kelompok manusia yang menempatkan diri sebagai penduduk resmi suatu negara sekaligus memberi efek terhadap perjuangan di seluruh dunia (Supardan, 2013: 42-43).

Secara antropologis dan sosiologis, bangsa adalah suatu persekutuan hidup yang berdiri sendiri dan masing-masing anggota persekutuan hidup tersebut merasa satu kesatuan ras, bahasa, agama, sejarah, dan adat istiadat (Yatim, 1999: 57). Sjamsuddin (1988: 37) menjelaskan bahwa "nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara". Sementara itu, bangsa adalah buah hasil tenaga

hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Lebih lengkapnya Kohn menerangkan bahwa:

Bangsa adalah buah hasil tenaga hidup dalam sejarah, dan karena itu selalu bergelombang dan tak pernah membeku. Bangsa-bangsa merupakan golongan yang beraneka ragam dan tak terumuskan secara eksak. Kebanyakan bangsa-bangsa itu memiliki faktor-faktor obyektif tertentu yang membuat mereka itu berbeda-beda dari bangsa-bangsa lainnya, misalnya persamaan keturunan, bahasa, daerah, kekuatan politik, adat istiadat dan tradisi, atau perasaan agama. Akan tetapi tidak ada satupun faktor-faktor ini yang bersifat hakiki untuk menentukan ada tidaknya atau untuk merumuskan bangsa itu (Kohn, 1984: 12).

Pemahaman tentang bangsa yang dikembangkan oleh Hans Kohn pada saat ini masih umum karena berkaitan dengan faktor etnis dan perbedaan lainnya yang memungkinkan muncul menjadi sebuah bangsa baru. Gejala di Afrika dan Eropa menunjukkan bahwa kecenderungan sebuah bangsa yang mempunyai persamaan-persamaan tertentu ingin membentuk negara sendiri (Romadi, 2018: 64). Sesungguhnya pengertian *nation* merupakan istilah yang lebih tepat daripada pengertian bangsa yang masih mengandung unsur-unsur anggapan bahwa sekalian anggota-anggota bangsa yang bersangkutan berasal dari nenek moyang yang sama (Supardan, 2013: 43).

Terdapat tokoh lainnya yang menerangkan tentang nasionalisme. Nasionalisme sebagai paham kebangsaan dimaknai sebagai wujud nyata dari perkumpulan bangsa tersebut. Terlihat dari pandangan Anderson (2006: 5), mendefinisikannya sebagai “*nation it is an imagined political community and imagined as both inherently limited and sovereign*”. Dapat dipahami bahwa bangsa merupakan suatu komunitas politik yang terbatas dan berdaulat yang dibayangkan. Nasionalisme memerlukan upaya pemeliharaan kebangsaan,

keadilan, kesejahteraan dan kemakmuran bersama. Persatuan dan kesatuan dapat terwujud manakala seluruh masyarakat memiliki nasionalisme kuat dan tanpa adanya etnosentris dalam suatu komunitas bangsanya.

Ernest Gellner dalam bukunya *On Nasionalisme* (Dewi, 2008: 3) mengatakan bahwa “*nationalisme is primerly a political principle, which holds that the political and the national unit should do congruent*”. Menurut penjelasan tersebut, dapat diartikan bahwa nasionalisme pada dasarnya merupakan suatu prinsip politik, yang menyatakan bahwa politik dan unit nasional harus selaras. Nasionalisme dapat berbentuk sentimen maupun gerakan.

Dari beberapa pandangan para tokoh di atas, dapat dirangkum bahwa nasionalisme merupakan suatu paham yang menjunjung tinggi tentang kedaulatan negara dimana di dalamnya mengandung pedoman bersama untuk selalu hidup dan berusaha berjuang mencapai tujuan yang dicita-citakan.

3. Pengertian Nilai-nilai Nasionalisme

Nasionalisme sebagai paham tentang kebangsaan mengandung nilai. Kajian nilai dapat dilihat pula dari pendapat Magnis Seuseno merupakan karsa atau kehendak kejiwaan manusia berfungsi sebagai pendorong bagi perbuatan manusia. Perbuatan manusia dapat dinilai baik atau buruk dan menjadi sarana untuk mengetahui arah dorongan kehendaknya. Nilai kebaikan yang ada pada manusia atau seseorang tidak dapat diamati, tetapi fenomena dari perbuatan itulah yang dapat diamati. Nilai terkandung dalam perbuatan yang sedang dinilai (Zakiyah dan Rusdiana, 2014: 15).

Nasionalisme sebagai bagian dari paham kebangsaan tentunya lekat dengan nilai-nilai. Pandangan nasionalisme menurut Kohn, adalah suatu paham yang berpendapat bahwa kesetiaan tertinggi individu harus diserahkan kepada negara kebangsaan, perasaan sangat mendalam akan suatu ikatan yang erat dengan tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya selalu ada di sepanjang sejarah dengan kekuatan-kekuatan yang berbeda-beda (Kohn, 1984: 11).

Berdasarkan penjelasan tentang nilai dan nasionalisme maka dapat diketahui bahwa terdapat hubungan antara nilai dan nasionalisme. Nilai nasionalisme dapat dirangkum bahwa segala sesuatu yang dirasa berharga dan dijadikan rujukan untuk mengukur tindakan-tindakan dalam menjunjung tinggi paham bangsa dan negara sehingga dapat tercapai cita-cita bersama.

Nilai-nilai nasionalisme dapat menentukan tingkah laku yang diinginkan suatu sistem yang berkaitan, dengan lingkungan sekitar tanpa membedakan fungsi-fungsinya. Nilai membawa dampak terhadap sikap mental dan tingkah laku individu atau masyarakat sehingga menunjukkan loyalitas atau pengabdian yang tinggi terhadap bangsa dan negaranya.

Menurut Latif dalam aktualisasi nasionalisme dibutuhkan suatu rasa memiliki bangsa. Rasa memiliki dan mencintai Indonesia yang menggelorakan semangat nasionalisme sebagai rasa syukur bisa bersifat negatif defensif dan positif progresif. Negatif defensif berarti tumbuhnya bibit-bibit nasionalisme mulai dikorbankan oleh tokoh keagamaan dan kesukuan yang bersifat lokal dan

berserak. Sedangkan, positif progresif berarti mengolah potensi dan sumber daya yang dimiliki demi kemakmuran dan kejayaan bangsa (Latif, 2017: 258).

Berbagai kenyataan bentuk dan perkembangan nasionalisme di segala penjuru maka dapat dijelaskan bahwa terdapat beberapa nilai yang menjadi pendorong nasionalisme semakin bermunculan dan berkembang. Bagi negara, nasionalisme dianggap penting karena memberikan pengaruh kuat untuk menjaga stabilisasi negaranya. Nasionalisme memberikan nilai positif kesatuan yang berguna bagi terwujudnya tujuan negara yang potensial. Sebagaimana penjelasan Smith (2002: 10), di mana “nasionalisme adalah suatu gerakan ideologis untuk mencapai dan mempertahankan otonomi, kesatuan, dan identitas bagi suatu populasi yang sejumlah anggotanya bertekad untuk membentuk suatu bangsa yang aktual atau bangsa yang potensial”. Sehingga dapat terwujud bangsa yang diharapkan sejak awal dirumuskannya konsep bangsa oleh para anggota dalam kelompok bangsa tersebut.

Nilai kesatuan lahir dari berbagai hal yang menjadi pendorong persatuan dapat terwujud dengan baik. Hertz (Taniredja dkk, 2009: 152) menerangkan nasionalisme ‘memainkan tiga fungsi yaitu: mengikat semua kelas, menyatukan mentalitas mereka dan membangun atau memperkokoh pengaruh terhadap kebijakan yang ada dalam kursi ideologi nasional’. Lebih jauh, Mulkhan (1996: 14), mencirikan “nasionalisme sebagai gagasan mengenai kesatuan kebangsaan dalam suatu wilayah politik kenegaraan”. Kesatuan menimbulkan perasaan untuk mementingkan kehidupan kenegaraan dibandingkan kepentingan pribadi atau golongan. Dibutuhkan sikap anti perusak dalam memaksimalkan nilai

kesatuan. Menurut Latif (2017: 299) bahwa “semangat persatuan dalam keragaman pada kehidupan masyarakat tampak dari pergaulan hangat antaretnis lokal dengan etnis keturunan” dengan sesama warga negara senantiasa terwujud sikap kesetiakawanan dan peduli terhadap sesama, hal demikian terdorong solidaritas di antara warga negara sehingga mempermudah tercapainya gagasan politik kenegaraan.

Apabila merujuk pemikiran Soekarno (Silaban, 2012: 3-4) ‘senjata persatuan ampuh muncul karena keinginan suatu bangsa melepaskan diri dari penjajahan, sekaligus adanya rasa persatuan dan cinta tanah air tanpa menonjolkan perbedaan yang ada dalam masyarakat’. Konteks yang diungkapkan Soekarno merupakan nasionalisme yang lahir karena wujud dari penindasan penjajahan. Latar belakang yang sama sebagai bangsa yang terjajah menjadikan nilai kesatuan tumbuh subur di seluruh kalangan masyarakat. Walaupun dapat disuguhkan bahwa kenyataan penerapan berbeda-beda dengan melihat pada tradisi-tradisi di berbagai wilayah. Maka perasaan kesatuan dan sangat merasuknya rasa cinta tanah air menjadikan nasionalisme semakin terlihat.

Nasionalisme mengandung nilai lain melalui perwujudan seorang individu menjunjung kesetiaan kepada negara kebangsaan. Sebagaimana dijelaskan oleh Kohn (1984: 11), nasionalisme berarti “menjunjung kesetiaan tertinggi individu yang diserahkan kepada negara kebangsaan, perasaan tersebut dituangkan dalam suatu ikatan yang erat dengan tanah tumpah darahnya, dengan tradisi-tradisi setempat dan penguasa-penguasa resmi di daerahnya”.

Hal sama dijelaskan oleh Sjamsuddin (1988: 37), “nasionalisme adalah suatu konsep yang berpendapat bahwa kesetiaan individu diserahkan sepenuhnya kepada negara”. Kesetiaan digambarkan dengan rasa kesetiaan, pengabdian, mempertahankan corak asli bangsanya, keyakinan, dan bangga terhadap identitas bangsanya. Lebih dari itu adalah dapat menjaga apa yang telah diperjuangkan bersama-sama pada proses sebelumnya. Mulkan (1996: 23) menjelaskan bahwa semangat kebangsaan patut dilestarikan “tidak lagi terletak pada pewaris nilai dalam formulasi struktural, melainkan kesadaran sebagai anak bangsa sesuai tuntutan zamannya”. Tidak mudah dalam menjaga keberhasilan masa lalu, dibutuhkan konseptualitas dan pemahaman yang signifikan mengenai nasionalisme.

Menurut John dan Cobb (Andreas, 2016: 164), menyebutkan bahwa pada dasarnya konsep nasionalisme mempunyai dua ciri pokok yaitu pertama, nasionalisme memilih tataran tertentu dari hierarki organisasi politik dan memberi kedaulatan penuh padanya. Kedua, nasionalisme berusaha meletakkan semua kelompok sosial lain dan berusaha agar mereka loyal terhadap bangsa. Dengan memperhatikan keberadaan berbagai komponen, kesetiaan dalam paham nasionalisme dapat terwujud manakala terdapat kesadaran tinggi dalam menjunjung ideologi bangsa.

Nilai kesetiaan dapat diaplikasikan terhadap pemilihan status kebangsaan oleh individu atau kelompok. Individu atau kelompok tetap menjunjung kesetiaan pada bangsa atau rela melepaskan diri karena tidak sesuai dengan jati dirinya. Sebagaimana diungkapkan oleh Hendrastomo (2005: 2), “nasionalisme

muncul apabila diharuskan memilih akan status kebangsaan, baik memilih hal yang berkenaan dengan kewarganegaraan, suatu kelompok, yang secara khayal ada keterikatan”.

Nasionalisme menurut Hutchinson dapat pula dipandang sebagai sebuah fenomena budaya daripada fenomena politik karena berakar pada etnisitas dan budaya promodern. Gerakan politik nasionalisme adalah sarana mendapatkan kembali harga diri etnik sebagai modal dasar membangun sebuah negara berdasarkan kesamaan budaya. Semangat kebangsaan akan mengalir rasa kesetiakawanan sosial, semangat rela berkorban dan dapat menumbuhkan jiwa patriotisme. Rasa kesetiakawanan sosial akan mempertebal semangat kebangsaan suatu bangsa (Herlina, 2018: 246). Dalam situasi politik maka menurut Latif (2017: 309) menerangkan bahwa perbedaan pandangan politik tidak berarti harus saling menjauhkan apalagi saling melenyapkan. Perbedaan tidak menjadi alasan untuk tidak menghormati dan bergaul sebagai sesama manusia.

Masih menyuguhkan tentang nilai nasionalisme. Disamping kedua nilai yakni kesatuan dan kesetiaan, perlu dipertegas lebih jauh tentang nilai nasionalisme yang muncul sebagai bentuk dan akibat dari gejala modern. Menurut Hara (2005: 21), nasionalisme mencakup konteks yang lebih luas yaitu “persamaan keanggotaan dan kewarganegaraan dari semua kelompok etnis dan budaya di dalam suatu bangsa”. Dalam kerangka nasionalisme, juga diperlukan kebanggaan untuk menampilkan identitasnya sebagai suatu bangsa. Jadi, jelas bahwa nasionalisme juga mengandung nilai kebanggaan yang melekat pada

kelompok etnis dan budaya untuk membuktikan diri dalam kehidupan kebangsaan.

Mustari (2011: 195), mengemukakan pendapat tentang indikator seseorang sebagai nasionalis apabila dilihat dalam konteks keindonesiaan diantaranya adalah menghargai jasa para tokoh/pahlawan nasional, bersedia menggunakan produk dalam negeri, menghargai keindahan alam dan budaya Indonesia, hafal lagu-lagu kebangsaan dan memilih berwisata dalam negeri.

Lebih lanjut, nasionalisme dalam negara kebangsaan dijiwai oleh lima prinsip nasionalisme, yakni 1) kesatuan, dalam wilayah teritorial, bangsa, bahasa, ideologi dan doktrin kenegaraan, sistem politik atau pemerintahan, sistem perekonomian, sistem pertahanan keamanan dan policy kebudayaan; 2) kebebasan, dalam beragama, berbicara dan berpendapat lisan dan tertulis, berkelompok dan berorganisasi; 3) kesamaan, dalam kedudukan hukum, hak dan kewajiban; 4) kepribadian dan identitas, memiliki harga diri, rasa bangga dan rasa sayang terhadap kepribadian dan identitas bangsanya yang tumbuh dari dan sesuai dengan sejarah dan kebudayaannya; 5) prestasi, yaitu cita-cita untuk mewujudkan kesejahteraan serta kebesaran dan kemanusiaan dari bangsanya (Kartodirdjo, 1999: 7)

Nasionalisme sebagai suatu ideologi, memerlukan aktualisasi sesuai perubahan zaman dan tantangan yang dihadapi. Musuh nasionalisme tidak lagi terbatas pada imperialisme, kolonialisme, separatisme, atau ideologi-ideologi lain. Namun, meluas kepada hal-hal di luarnya, seperti kemiskinan, keterbelakangan, penindasan hak asasi dan sebagainya (Rachmat, 1996).

Lebih lanjut bahwa ada banyak cara untuk mengekspresikan kecintaan pada Nusa Bangsa. Nasionalisme tidak hanya ditujukan untuk memerangi keburukan, tetapi juga menghadirkan kebaikan. Nasionalisme tidak hanya bersandar pada apa yang bisa kita lawan, melainkan juga pada apa yang bisa kita tawarkan. Nasionalisme sejati haruslah berarti bukan sekadar mempertahankan, melainkan juga memperbaiki keadaan negeri (Latif, 2017: 272).

Berdasarkan penjelasan di atas dapat dirangkum bahwa nasionalisme memiliki berbagai nilai yang melekat dan saling memengaruhi diantaranya nilai kesatuan, nilai kesetiaan, dan nilai kebanggaan, di mana masing-masing nilai terdapat faktor pendorong tercipta dan berkembangnya nilai tersebut. Nilai-nilai nasionalisme merupakan harapan, cita-cita yang dengan perjalanannya diwujudkan untuk membangun masa depan bangsa tanpa melihat pada perbedaan kelompok di masyarakat. Apabila nilai-nilai nasionalisme dapat diaktualisasikan dengan baik, maka suatu bangsa dan negara memiliki kualitas nasionalisme yang baik pula.

4. Pendidikan Kewarganegaraan sebagai wahana penanaman nasionalisme

Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) menjadi salah satu bidang ilmu sosial yang dikembangkan untuk membentuk warga negara berkompeten. Diharapkan warga negara dapat berkontribusi dalam pembangunan negara baik dalam tingkat nasional maupun global. Sebagai esensinya, Pendidikan Kewarganegaraan memiliki paradigma studi sosial dalam hal “membangun kompetensi warga negara dan membantu para siswa/pemuda mengembangkan

kemampuan mengambil keputusan yang jernih dan bernalar untuk kepentingan umum sebagai warga negara dalam masyarakat yang berbhineka dan mendunia” (Winataputra, 2012: 152).

Branson mengaitkan kompetensi kewarganegaraan ke dalam ‘tiga komponen utama yaitu *civic knowledge*, *civic skills*, dan *civic dispositions*’ (Winataputra, 2012: 199). Pengembangan ketiga komponen tersebut menunjukkan bahwa Pendidikan Kewarganegaraan merupakan bidang keilmuan yang bersifat multidimensional dan terpadu dalam ranah (*domain*) yang dikembangkannya. Pandangan Cogan (Wahab, 2011: 34) menjelaskan bahwa kebijakan pendidikan di masa depan harus berdasarkan pada suatu konsepsi kewarganegaraan multidimensional sebagai konsepsi yang cocok dengan kebutuhan dan keinginan umat, konsepsi ini harus menembus semua aspek pendidikan, termasuk kurikulum dan pendidikan, pemerintahan dan organisasi serta keterkaitan antarmasyarakat.

Pendidikan Kewarganegaraan sebagai salah satu bidang keilmuan tidak hanya diterapkan di dalam sekolah akan tetapi dapat pula diterapkan di luar sekolah. Penerapan ini tidak lain adalah untuk mewujudkan warga negara yang memiliki kompetensi dalam kehidupan bermasyarakat. Adanya pelaksanaan pendidikan di lingkungan masyarakat dapat dilihat dari pendapat Cogan (Winataputra, 2001: 20) memberikan penjelasan Pendidikan Kewarganegaraan (*Civic Education* atau *Citizenship Education*) sebagai berikut:

Civic Education sebagai suatu mata pelajaran dasar di sekolah yang dirancang untuk mempersiapkan warga negara muda, agar kelak setelah dewasa dapat berperan aktif dalam masyarakatnya. Sedangkan *Citizenship Education* atau *education for citizenship* memiliki pengertian

lebih luas yang mencakup pengalaman belajar di sekolah dan di luar sekolah seperti di rumah, dalam organisasi keagamaan, dalam organisasi kemasyarakatan, melalui media massa, dan lain-lain yang berperan membantu proses pembentukan totalitas atau keutuhan sebagai warga negara.

Menurut Wahab (2011: 97), bahwa Pendidikan Kewarganegaraan terdiri dari tiga domain yaitu domain akademis, domain kurikuler, dan domain sosial kultur. Domain akademis merupakan berbagai pemikiran tentang PKn yang berkembang di lingkungan komunitas keilmuan. Domain kurikuler merupakan konsep dan praksis PKn dalam dunia pendidikan formal dan nonformal. Domain sosial kultural merupakan konsep dan praksis PKn di lingkungan masyarakat. Oleh karena itu pendidikan kewarganegaraan merupakan bidang kajian yang *multifacet/multidimensional*, kajian multidimensional inilah yang membuat bidang kajian PKn dapat disikapi sebagai pendidikan kewarganegaraan, pendidikan kemasyarakatan.

Pendidikan Kewarganegaraan memegang peranan penting dalam membentuk nasionalisme. Hal ini disebabkan karena tuntutan perkembangan masyarakat dan kehidupan bernegara yang demikian maju dengan segala tantangannya. Sebagaimana dijelaskan oleh Maftuh (2008: 137) bahwa Pendidikan Kewarganegaraan pada masa sekarang ini memiliki misi sebagai berikut:

1. PKn sebagai pendidikan politik, yang berarti program pendidikan ini memberikan pengetahuan, sikap dan keterampilan kepada siswa agar mereka mampu hidup sebagai warga negara yang memiliki tingkat kemelekan politik (*political literacy*) dan kesadaran berpolitik (*political awareness*), serta kemampuan berpartisipasi politik (*political participation*) yang tinggi.
2. PKn sebagai pendidikan nilai (*value education*), yang berarti melalui PKn diharapkan tertanam dan tertransformasikan nilai, moral, dan

norma yang dianggap baik oleh bangsa dan negara kepada diri siswa, sehingga mendukung bagi upaya *nation and character building*. Dalam hal ini, nilai-nilai Pancasila tetap harus menjadi rujukan utama dalam upaya pendidikan nilai ini.

3. PKn sebagai pendidikan nasionalisme, yang berarti melalui PKn diharapkan dapat ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa kebangsaan atau nasionalisme siswa, sehingga mereka lebih mencintai, merasa bangsa, dan rela berkorban untuk bangsa dan negaranya.
4. PKn sebagai pendidikan hukum, yang berarti bahwa program pendidikan ini diarahkan untuk membina siswa sebagai warga negara yang memiliki kesadaran hukum yang tinggi, yang menyadari akan hak dan kewajibannya, dan yang memiliki kepatuhan terhadap hukum yang tinggi.
5. PKn sebagai pendidikan multikultural (*multicultural education*), yang berarti PKn diharapkan mampu meningkatkan wawasan dan sikap toleran siswa dan mahasiswa untuk hidup dalam masyarakatnya yang multikultural.
6. PKn sebagai pendidikan resolusi konflik (*conflict resolution education*), yang berarti PKn membina siswa dan mahasiswa untuk mampu menyelesaikan konflik secara konstruktif.

Berdasarkan penjelasan di atas diketahui bahwa Pendidikan Kewarganegaraan sebagai bagian dari ilmu sosial mewujudkan warga negara kompeten, salah satunya adalah membentuk warga negara yang nasionalis. Nasionalisme dalam Pendidikan Kewarganegaraan bertujuan untuk menjadikan warga negara atau masyarakat yang berusaha menjunjung tinggi kebangsaan yang dilaksanakan baik dalam sekolah maupun di luar sekolah. Puncaknya adalah suatu negara tercipta masyarakat yang nasionalis dan mengembangkan bangsa dan negara semakin mewujudkan tujuannya.

C. Tinjauan tentang Organisasi Muhammadiyah

1. Pengertian Organisasi Muhammadiyah

Terminologi istilah organisasi sangat luas dan pada batas-batas tertentu mencerminkan nilai pembeda sesuai bidang objek setiap organisasi. Menurut Thoha (2003: 124), organisasi dapat didefinisikan sebagai “suatu kerangka hubungan yang berstruktur yang menunjukkan wewenang, tanggung jawab dan pembagian kerja untuk menjalankan suatu fungsi tertentu”.

Tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat berbagai macam bentuk organisasi baik organisasi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, maupun organisasi lain yang secara praktik hanya melaksanakan tujuan yang sederhana. Merujuk organisasi kemasyarakatan bahwa ideologi memiliki peranan penting. Pada organisasi masyarakat ideologi mempertajam formulasi tujuan organisasi, merekatkan semua anggota yang jumlahnya besar, memberikan identitas kepada semua anggota dan ideologi digunakan untuk menuntut organisasi memainkan perannya dalam kehidupan.

Organisasi masyarakat (ormas) merupakan organisasi yang dibentuk oleh kalangan masyarakat yang bersifat mandiri, organisasi seperti ini idealnya tidak menggantungkan diri kepada pemerintah, terutama dalam dukungan finansial dan sarana prasarana. Organisasi ini dibentuk sebagai perwujudan dari komitmen sejumlah warga negara yang mempunyai kepedulian terhadap persoalan-persoalan yang muncul, baik dalam bidang pendidikan, ekonomi, sosial maupun politik (Argenti, 2017: 83).

Atas dasar keberagaman di dalam masyarakat menyebabkan organisasi semakin bermunculan. Baik organisasi yang dilatarbelakangi oleh sosial, kebudayaan maupun agama. Melihat hal tersebut perlu dikaji mengenai Muhammadiyah yang merupakan salah satu jenis organisasi masyarakat yang muncul dan berusaha memberikan kontribusi untuk negara Indonesia.

Muhammadiyah secara etimologis berasal dari bahasa Arab, nama Nabi dan Rasul Allah terakhir yaitu Muhammad berarti terpuji. Ditambah dengan 'ya' nisbah' yang berfungsi menjeniskan atau membangsakan atau bermakna pengikut. Sehingga, Muhammadiyah adalah kelompok pengikut Nabi Muhammad Shallallahu 'alaihi wa Sallam. Berdasarkan Anggaran Dasar dapat dijelaskan bahwa Muhammadiyah adalah organisasi yang didirikan oleh Ahmad Dahlan pada tanggal 8 Dzulhijjah tahun 1330 H atau bertepatan tanggal 18 November 1912 M di Yogyakarta dengan becirikan sebagai organisasi gerakan dakwah Islam amar maruf nahi munkar dan tajdid, berakidah Islam dan bersumber pada al-Quran dan as-Sunnah.

Dibentuknya organisasi Muhammadiyah tidak lain adalah menjunjung tinggi Agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenarnya. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukan usaha-usaha pelaksanaannya sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar pada pasal 7 tentang Usaha yaitu: (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan, Muhammadiyah melaksanakan dakwah amar maruf nahi munkar dan tajdid yang diwujudkan dalam usaha di segala bidang kehidupan, (2) Usaha Muhammadiyah diwujudkan dalam bentuk amal usaha, program dan kegiatan yang macam dan

penyelenggaraannya diatur dalam Anggaran Rumah Tangga, (3) Penentu kebijakan dan penanggung jawab amal usaha, program dan kegiatan adalah Pimpinan Muhammadiyah.

2. Sejarah Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah sebagai persyarikatan sudah dikenal luas oleh masyarakat. Organisasi ini didirikan oleh K.H. Ahmad Dahlan yang “lahir dari Kampung Kauman Yogyakarta Tahun 1908 dengan nama kecilnya Muhammad Darwis” (Rohmansyah, 2017: 35). Pada umur 15 tahun, Muhammad Darwis melaksanakan haji dan tinggal di Mekah sekaligus menggali ilmu. Pada tahun 1903, Ahmad Dahlan bertolak kembali ke Mekkah dan menetap selama dua tahun. Pada tanggal 8 Dzulhijjah 1330 Hijriyah bertepatan dengan tanggal 18 November 1912 Miladiyah di Yogyakarta, Muhammadiyah didirikan oleh Ahmad Dahlan.

Kemunculan Muhammadiyah didasarkan karena umat Islam belum melaksanakan ajaran agama Islam secara murni yang ditandai dengan berbagai macam bentuk ritual dan kesyirikan yang berkembang. Disisi lain, didirikan agar dapat mencontoh dan meneladani sifat dan perjuangan Muhammad dalam menegakkan ajaran agama Islam dalam “mewujudkan *Izzul Islam wa Muslimin*, kejayaan Islam sebagai realita dan kemuliaan hidup umat Islam sebagai realita” (Pasha dan Darban, 2003: 119).

Muhammadiyah merupakan gerakan Islam bercirikan dakwah *amar makruf nahi munkar* yang dalam sejarah memiliki faktor-faktor dalam melatar belakangi berdirinya Persyarikatan Muhammadiyah. Adapun faktor tersebut yaitu faktor subyektif dan faktor obyektif (Pasha dan Darban,2003: 120-126).

1) Faktor subjektif, merupakan faktor utama dan penentu berdirinya Muhammadiyah.

Faktor ini merupakan pendalaman KH Ahmad Dahlan terhadap Al-Quran baik dalam hal gemar membaca maupun menelaah, membahas dan mengkaji kandungan isinya. KH Ahmad Dahlan telaah sedemikian teliti, dipertanyakan juga sebab-sebab yang menjadikan suatu ayat diturunkan, dipertanyakan, apakah yang mesti harus dilakukan.

2) Faktor objektif, merupakan kejadian nyata atau sesuai dengan kenyataan.

Berdasarkan faktor yang melatar belakangi terbentuknya Muhammadiyah dapat dikelompokkan ke dalam faktor internal dan eksternal yang dapat dijelaskan bahwa:

Faktor internal yaitu faktor penyebab yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat Islam Indonesia yang meliputi: (1) ketidakmurnian amalan Islam akibat tidak dijadikannya Al-Quran dan As-Sunnah sebagai satu-satunya rujukan oleh sebagian besar umat Islam Indonesia, (2) lembaga pendidikan yang dimiliki umat Islam belum mampu menyiapkan generasi yang siap mengemban misi selaku “khalifah Allah di atas bumi”. Sementara faktor eksternal sebagai faktor-faktor penyebab yang ada di luar tubuh masyarakat Islam Indonesia dapat meliputi: (1) semakin meningkatnya gerakan kristenisasi di tengah-tengah masyarakat Indonesia, (2) penetrasi bangsa-bangsa Eropa, terutama Bangsa Belanda ke Indonesia, (3) pengaruh dari gerakan pembaharuan dalam dunia Islam.

Selain faktor tersebut, ditemukan empat teori yang dikemukakan oleh Alwi Shihab (Rohmansyah, 2017: 39-40) mengenai latar belakang lahirnya Muhammadiyah yang menguatkan dua faktor tersebut yaitu:

Pertama, teori faktor gagasan pembaharuan Islam di Timur Tengah. *Kedua*, teori faktor pembaharuan Muhammad Abduh dan Jamal al-Din al-Afghani tumbuh di Timur Tengah pada akhir abad ke-19. *Ketiga*, teori faktor pertentangan internal dalam masyarakat Jawa. *Keempat*, teori faktor penetrasi Kristen.

Dilihat dari segi sejarahnya Muhammadiyah sejak masa kolonial Belanda hingga berakhirnya masa Orde Baru dapat dipetakan bahwa terdapat empat periode orientasi perjalanan Muhammadiyah yaitu:

- a. Orientasi Religius-Kultural (1912-1937), yang memakai strategi kultural tetapi ruang gerak orientasinya lebih pada bidang keagamaan (religius).
- b. Orientasi Politis-Struktural (1937-1971), organisasi ini mengadopsi strategi politis/struktural sebagai strategi dasarnya, baik dengan mengindahkan ataupun menafikan strategi kultural sebagai basis strategi awalnya.
- c. Orientasi Sosial-Kultural (1971-1995), Muhammadiyah kembali menggunakan strategi dasar kultural namun orientasi ruang geraknya lebih menjangkau bidang/kawasan sosial kemasyarakatan.
- d. Orientasi Politis-Kultral (1995-1998), bertumpu pada strategi kultural tetapi ada kecenderungan berorientasi politis dalam ruang geraknya (Suwarno, 2002: 21)

Muhammadiyah sebagai organisasi persyarikatan memiliki peranan penting dalam menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam. Berbagai faktor yang melatarbelakanginya mengartikan bahwa Muhammadiyah benar-

benar menjalankan fungsi mereka sebagai organisasi berusaha mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

3. Identitas Organisasi Muhammadiyah

Muhammadiyah memiliki tiga identitas organisasi yaitu sebagai gerakan Islam, gerakan dakwah Islam dan gerakan tajdid. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam di identikan dengan pemurnian ajaran Islam berdasarkan Al-Quran dan sunnah Nabi. Muhammadiyah meletakkan dasar dakwahnya sesuai jalan *amar makruf nahi munkar* sebagai ciri dari gerakan dakwah Islam. Sementara, gerakan tajdid bermakna memurnikan ajaran Islam dari berbagai kotoran yang menempel dan upaya pembaharuan cara-cara pelaksanaan ajaran Islam dalam kehidupan ber masyarakat.

Sebagai organisasi gerakan, Muhammadiyah memiliki landasan yang menjadi dasar aturan dan panduan. Landasan tersebut dapat dibedakan menjadi landasan ideal (mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah, kepribadian Muhammadiyah, matan keyakinan dan cita-cita hidup Muhammadiyah, pedoman hidup islami warga Muhammadiyah), landasan konstitusional yaitu Anggaran Dasar Rumah Tangga, dan landasan operasional (pola tugas dan usaha, khittah Muhammadiyah).

Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan keputusan penting Muhammadiyah dalam memandang perintah dan ajaran Al-Quran dan As-sunnah tentang pengabdian manusia kepada Allah, memaksimalkan kedudukan manusia selaku hamba dan khalifah di muka bumi. Mukadimah anggaran dasar Muhammadiyah merupakan hasil perenungan dan refleksi Ki

Bagus Hadikusumo terhadap Pemikiran K.H. Ahmad Dahlan yang didasarkan pada terarahnya perkembangan Muhammadiyah sekaligus semakin kuatnya pengaruh luar yang tidak sesuai dengan paham dan keyakinan hidup Muhammadiyah, dan terdapat faktor politik yaitu dorongan disusunnya pembukaan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Maksud dan tujuan Muhammadiyah sebagaimana telah dirumuskan dalam Anggaran Dasar Muhammadiyah adalah menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat utama, adil, dan makmur yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekaligus secara luas seperti diungkapkan Pasha dan Darban (2003: 134) dijabarkan:

- a. Menegakkan, berarti membuat dan mengupayakan agar tetap tegak dan tidak condong apalagi roboh.
- b. Menjunjung tinggi, berarti membawa atau menjunjung di atas segala-galanya mengindahkan serta menghormatinya.
- c. Agama Islam, rumusan maksud persyarikatan searti dan sejiwa dengan ungkapan *'li i'lai kalimatillahi* yaitu menegakkan kalimat Allah/Agama Allah atau Agama Islam.
- d. Terwujud, berarti menjadi satu kenyataan akan adanya atau akan wujudnya.
- e. Masyarakat utama, yaitu masyarakat yang senantiasa mengejar keutamaan dan kemaslahatan untuk kepentingan hidup umat manusia, masyarakat yang selalu bersikap takzi, terhadap Allah, mengindahkan dengan penuh keikhlasan terhadap ajaran-ajarannya, serta menaruh hormat teradap sesama manusia yang memiliki martabat *ahsanu taqwim*.
- f. Adil dan makmur, yaitu suatu kondisi masyarakat yang di dalamnya terpenuhi dan kebutuhan hidup yang pokok yaitu (1) adil, suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek batiniah, (2) makmur, suatu kondisi masyarakat yang positif dari aspek lahirian, (3) yang diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala, artinya dalam rangka mengupayakan terciptanya keadilan dan kemakmuran masyarakat maka jalan dan cara yang ditempuh haruslah selalu bermotifkan semata-mata mencari keridhaan Allah belaka.

Cita-cita membentuk masyarakat Islam yang sebenar-benarnya harus tetap diwujudkan dalam berbagai bentuk kesepatakan Muhammadiyah Kepribadian Muhammadiyah. “Kepribadian Muhammadiyah mengalami perbaikan dari Tanwir menjelang Mukhtamar ke-35 hingga sempurna, maka pada Mukhtamar ke-35 disahkan oleh K.H. Faqih Usman” (Rohmansyah, 2017: 72). Cita-cita Muhammadiyah dilanjutkan dengan dirumuskannya Matan Keyakinan dan Cita-cita Hidup Muhammadiyah. Salah satu isinya menerangkan bahwa Muhammadiyah mengajak segenap lapisan bangsa Indonesia yang telah mendapat karunia Allah berupa tanah air yang mempunyai sumber-sumber kekayaan, kemerdekaan bangsa dan Negara Republik Indonesia yang berdasar pada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, untuk berusaha bersama-sama menjadikan suatu negara yang adil dan makmur dan diridhai Allah Subhanahu wa Ta'ala yaitu negara *baldatun thayyibatunwa rabbun ghafur*.

Tidak dapat dipungkiri bahwa Muhammadiyah pada periode awal berdiri berjalan luwes karena dalam praktiknya sendiri lebih memilih relasi terlebih dahulu. Hal ini berdampak pada sifat legal nya organisasi sampai mendapat izin dari Gubernur Jenderal Belanda saat itu sampai akhirnya Muhammadiyah dapat mengepakkan sayapnya untuk bergerak dan berdakwah. Bidang sosial, ekonomi dan pendidikan anggotanya merupakan hal yang digenjut dengan serius.

Sebagai tokoh pendiri Muhammadiyah, K.H. Ahmad Dahlan merupakan salah satu penentu wujud nasionalisme Muhammadiyah. Sebagaimana di jelaskan di muka bahwa identik dengan gerakan dan perjuangan yang

dilontarkan pendirinya. Hal ini pun di gambarkan oleh Nimah (2014: 136) bahwa rasa nasionalisme K.H. Ahmad Dahlan identik dengan gerakan dan perjuangan. K.H. Ahmad Dahlan adalah potret seorang pejuang dan pahlawan. Kepahlawanannya bukan dalam sosok prajurit yang memanggul senjata dan gugur dalam medan perang, tetapi dalam sosok kemanusiaan yang mengabdikan dirinya kepada kepentingan dan kemaslahatan pendidikan, dakwah dan sosial keagamaan dalam wawasan kebangsaan yang kental dan integral.

K.H. Akhmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah, sangat penting perannya dalam menanamkan semangat nasionalisme. K.H. Ahmad Dahlan sangat giat dalam menggerakkan masyarakat untuk menginsafi perlu mutlaknya pendidikan, kemudian menyelenggarakannya untuk menyiapkan kader-kader bangsa bagi pembangunan di kemudian hari. Pemuda-pemuda harus dididik dengan pengetahuan umum yang luas dan mendalam, tetapi tidak melupakan pendidikan akhlak yang mendalam pula. Dengan pola pendidikan itu, akan tercipta manusia intelek yang bermoral agama.

Pendidikan Muhammadiyah merupakan pendidikan modern yang mengintegrasikan agama dengan kehidupan sosial, iman dengan kemajuan holistik. Dari pendidikan Islam diharapkan generasi muda Islam yang kuat iman dan kepribadiannya, mampu menghadapi dan menjawab tantangan zaman (Rohmansyah, 2017: 120).

Merujuk pandangan Kahim (1995: 54) bahwa pengembangan nasionalisme Indonesia sangat erat hubungannya dengan sejarah perjuangan bangsa Indonesai dalam merebut kemerdekaan dari cengkaman penjajah. Perjuangan bangsa Indonesia ini sudah di mulai sejak zaman kerajaan di nusantara. Kahim menyatakan kapan di mulainya nasionalisme Indonesia tidak dapat disebutkan atau diperkirakan secara tepat. Ini merupakan suatu fase yang baru mulai disebut dengan jelas dan terorganisir pada dasawarsa abad ke-20. Namun kebanyakan unsur pokoknya yang penting sudah ada jauh sebelumnya.

Pembangunan kembali nasionalisme dapat dilakukan dengan melacak asal-mula nasionalisme yaitu dengan memahami mentalitas kaum intelegensia pada masa tersebut. Respon dan kesadaran mereka dalam menghadapi situasi serta kondisi hidup yang mereka hadapi merupakan jembatan dalam mengkaji nasionalisme lebih mendalam. Kemudian seberapa jauh ada kesadaran sejarah pada diri mereka. Sehingga dapat diketahui tentang kesadaran dalam mencanangkan gerakan mereka (Kartodirdjo, 1993: 59)

Berbagai kegiatan yang dimilikinya merupakan bukti konkrit Muhammadiyah tetap menjaga marwah keindonesiaan. Dapat dipastikan Muhammadiyah tidak terpisahkan dari narasi Indonesia. Dalam perwujudannya memainkan peran penting pada pra kemerdekaan dan pasca kemerdekaan. Bukan hal mudah bagi Muhammadiyah untuk selalu berjuang atas dasar nasionalisme. Berbagai komponen yang terdapat di dalam Muhammadiyah baik berada pada tingkat pusat sampai daerah, baik secara personal maupun secara institusional saling berintegrasi agar bertindak loyal terhadap negara.

D. Penelitian Relevan

Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan kajian relevan yang berkaitan dengan nasionalisme dalam organisasi dan kajian berkaitan dengan Muhammadiyah yaitu sebagai berikut:

1. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Al Kahfi Bibul Zaki berjudul Nilai-nilai Nasionalisme dalam Kegiatan Pencak Silat Tapak Suci Putera Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini menghasilkan bahwa pertama, muatan nilai-nilai nasionalisme yang terkandung di kegiatan tersebut adalah kesetiaan, kebanggaan, dan persatuan. Kesetiaan terbentuk melalui pembinaan dan pelestarian sebagai budaya bangsa. Kebanggaan lahir sebagai kader pencak silat serta dalam penggunaan bahasa nasional dan penamaan jurus. Sementara nilai persatuan terwujud dalam kehidupan berbangsa dan bernegara direalisasikan melalui bentuk persatuan dan persaudaraan dalam semua kegiatan terutama latihan dan kejuaraan antar perguruan.
2. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Yogi Pratama berjudul Peranan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) dalam Meningkatkan Sikap Nasionalisme. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Dihasilkan penelitian bahwa peran Organisasi Gerakan Mahasiswa Indonesia yaitu menunjukkan sikap nasionalisme, pembentukan karakter berbasis pada nilai-nilai ideologi Pancasila, serta pelaksanaan sikap dalam organisasi berada pada kategori baik. Hal ini

berarti peranan Organisasi Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia dapat menjadikan anggotanya memiliki sikap Nasionalis. Peran organisasi memang penting dalam upaya pembentukan nasionalisme melalui kebiasaan selalu rajin tanpa harus diperintah dan konsisten tanpa harus diawasi. Terbentuknya sikap nasionalisme terdorong karena bertekad hidup dalam wilayah NKRI, tetap setia dan berusaha mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia.

3. Di dalam skripsi yang ditulis oleh Eidirno berjudul Persepsi Masyarakat terhadap Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu Kabupaten Polewari Mandar. Penelitian ini menggunakan pendekatan sosiologis dengan metode deskriptif. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian ini adalah perkembangan gerakan Muhammadiyah di Kecamatan Tubbi Taramanu mengalami pasang surut karena faktor internal yaitu tokoh yang tidak terlalu aktif sementara faktor eksternal adalah masyarakat masih menutup diri dari Muhammadiyah. Kemudian persepsi masyarakat terhadap Muhammadiyah sangat beragam ada sebagian yang mendukung dan adapula yang biasa saja. Pengaruhnya adalah perbedaan persepsi tentang Muhammadiyah yakni perasaan, sikap dan kepribadian individu, dan dalam perbedaan motivasi. Pada dasarnya persepsi tersebut lahir dari proses pengalaman, belajar dan pengetahuan tentang Muhammadiyah.
4. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Gili Argenti berjudul Civil Society dan Politik Moral Muhammadiyah. Penelitian ini menggunakan metode

deskriptif kualitatif. Pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan. Diperoleh hasil bahwa secara politik moral dapat dibedakan dalam tiga hal yaitu. Pertama, pasca reformasi Muhammadiyah memainkan peran cukup signifikan sebagai kekuatan civil society walaupun sebatas politik moral seperti peran dalam proses RUU Anti Pornografi dan Pornoaksi. Kedua, Muhammadiyah berkontribusi dalam penyelesaian konflik di beberapa daerah seperti Aceh, Ambon, Poso dan Papua. Ketiga, Muhammadiyah menggunakan jalur konstitusional dalam menguji materil undang-undang serta melakukan konferensi pers bersama kekuatan civil society lain.

5. Di dalam jurnal yang ditulis oleh Muhammed Junaidi berjudul Revitalisasi Ideologi Muhammadiyah dalam Penguatan Kader Persyarikatan. Penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan. Peneliti menelusuri data berupa buku atau karya tentang Muhammadiyah sebagai bahan informasi. Didapatkan hasil bahwasanya diperlukan peneguhan kembali ideologi bermuhammadiyah karena semakin beragamnya masalah sosial masyarakat karena globalisasi berdampak pada internal Muhammadiyah yaitu para kader yang tidak lagi mampu berjalan sebagaimana mestinya. Permasalahan merosotnya religiusitas masyarakat dan sulit merekrut kader potensial pada tingkat ranting menjadi permasalahan lebih mengerucut. Alhasil diupayakan sistem perkaderan berupa rekrutmen dan sistem perkaderan melalui jalur pendidikan, majelis pendidikan kader dan keluarga.

E. Kerangka Berfikir

